

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Jakarta, 06 Maret 2023

Nomor : 315c/3.a2/LIS/03/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keputusan Akreditasi

Kepada Yth.
Pimpinan PT Ayamaru Sertifikasi
Komplek Ruko Braja Mustika B-11,
Jl. Dr. Semeru, Bogor,
Jawa Barat

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil tindak lanjut rapat Komite Akreditasi Nasional (KAN) tanggal 22 Februari 2023, KAN telah memutuskan untuk memberikan akreditasi kepada PT Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan nomor akreditasi LPVI-001-IDN sesuai ruang lingkup terlampir.

Selanjutnya kepada LPVI PT Ayamaru Sertifikasi diberikan hak untuk menggunakan simbol akreditasi atau pernyataan diakreditasi oleh KAN sesuai dengan acuan KAN-U-03 untuk ruang lingkup yang diberikan.

Masa akreditasi berlaku dari tanggal 06 Maret 2023 – 1 September 2027. Kunjungan pengawasan (surveilen) berikutnya akan dijadwalkan mengikuti masa berlaku surveilen terakhir dengan ketentuan waktu mengikuti program asesmen.

Perlu kami sampaikan bahwa penerbitan sertifikat dan lampiran sertifikat akreditasi sedang dalam proses.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Komite Akreditasi Nasional
Plt. Deputi Bidang Akreditasi BSN
selaku Sekretaris KAN,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR

Donny Purnomo
NIP. 19750115 200003 1 00

Tembusan Yth:

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Lampiran Surat No. 315c/3.a2/LIS/03/2023

Sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

Kelompok Ruang Lingkup LVLK Hutan

Lampiran	Ruang Lingkup Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
1.1	Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari Pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan hak Pengelolaan pada Hutan Produksi.
1.2	Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari Pada Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan hak Pengelolaan pada Hutan Lindung

Lampiran	Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Hulu
2.1	VLHH Kayu pada PBPH dan Hak Pengelolaan
2.2	VLHH Kayu pada PKKNK
2.3	VLHH Kayu pada Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial
2.4	VLHH Kayu pada Hutan Hak

Lampiran	Ruang Lingkup Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Hilir
3.1	VLHH Kayu pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
3.2	VLHH Kayu pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri (PB untuk kegiatan usaha industri)
3.3	VLHH Kayu pada TPT-KB
3.4	VLHH Kayu pada Eksportir
3.5	VLHH Kayu pada Importir